

## Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Inklusif Bagi Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta

<sup>1</sup>Faza Dhora Nailufar, <sup>2\*</sup>Saut Gracer Sijabat, <sup>3</sup>R.N Afsdy Saksono, <sup>4</sup>Aghitsna Putri Taqiyya

<sup>1,2,3,4</sup>Politeknik STIA LAN Jakarta

e-mail: fazadhora@stialan.ac.id<sup>1</sup>, saut.s@stialan.ac.id<sup>2\*</sup>, afsdy@stialan.ac.id<sup>3</sup>,  
2220011028@stialan.ac.id<sup>4</sup>

\*Corresponding Author

Submit: 18 Maret 2024; revisi: 1 Juni 2024, diterima: 12 Juni 2024

### ABSTRAK

Salah satu kelompok rentan yang kerap kali kurang diperhatikan dalam proses Pembangunan adalah kelompok disabilitas. Hal ini dikarenakan masih ada stigma dan stereotype yang negatif terhadap mereka. Untuk itu pada tahun 2016, pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait penghormatan dan perlakuan layak terhadap kelompok disabilitas melalui Undang-Undang No.8 Tahun 2016. Salah satu cara untuk mengoptimalkan pelibatan kelompok disabilitas dalam Pembangunan adalah melalui program Desa Inklusif atau Desa Ramah Disabilitas. Desa inklusi dibangun dengan melibatkan dukungan dan partisipasi masyarakat desa, dengan mengafirmasi kelompok yang minoritas, miskin, rentan, dan marginal. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk mendorong terintegrasinya prinsip inklusifitas dalam perencanaan Pembangunan di desa dengan cara mendorong para birokrat, terutama birokrat desa (Kepala Desa) agar aktif menginterasikan prinsip inklusifitas dalam perencanaan Pembangunan di desa. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menyoar kepada para Kepala Desa di seluruh Kabupaten Purwakarta. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan topik Perencanaan Pembangunan Inklusif ini terlaksana dengan baik, di mana respon para kepala desa terhadap kegiatan yang sudah dilakukan dinilai sangat baik, hal ini dapat dilihat dari hasil survey pre-test dan post-test yang meningkat, evaluasi atas pelaksanaan kegiatan, saran dan masukan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan ini, serta peserta mendapat pembelajaran yang dengan adanya forum diskusi berbentuk FGD dan mendapat gagasan dari narasumber yang dihadirkan. Ke depannya, disarankan agar kegiatan seperti ini dapat dilakukan secara berkala, termasuk juga melakukan kegiatan lanjutan agar dapat diberikan solusi yang konkret dan komprehensif bagi lokus kegiatan.

**Kata kunci:** Pemberdayaan Masyarakat, Pelatihan Perencanaan Inklusif, Perencanaan Desa

### ABSTRACT

One of the vulnerable groups that is often less considered in the development process is the disability group. This is because there is still a negative stigma and stereotype against them. For this reason, in 2016, the government has issued regulations related to respect and proper treatment of disability groups through Law No.8 of 2016. One way to optimize the involvement of disability groups in development is through the Inclusive Village or Disability Friendly Village program. Inclusive villages are built by involving the support and participation of village communities, by affirming minority, poor, vulnerable and marginalized groups. This community service program aims to help the Purwakarta Regency

*Government to encourage the integration of the principle of inclusiveness in village development planning by encouraging bureaucrats, especially village bureaucrats (Village Heads) to actively integrate the principle of inclusiveness in village development planning. This community service activity targets Village Heads throughout Purwakarta Regency. The results of this community service activity on the topic of Inclusive Development Planning were well carried out, where the response of the village heads to the activities that had been carried out was considered very good, this can be seen from the increased pre-test and post-test survey results, evaluation of the implementation of activities, suggestions and input from participants on the implementation of the program.*

**Keywords:** *Community Development, Inclusive Planning Training, Village Planning*



Copyright © 2024 The Author(s)

This is an open access article under the CC BY-SA license.

## PENDAHULUAN

Salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) adalah Pembangunan yang inklusif. Inklusif, merujuk pada suatu konsep atau prinsip yang menekankan pada penerimaan, pengakuan, dan keterlibatan aktif dari berbagai kelompok, individu, atau elemen dalam suatu lingkungan atau kegiatan tertentu. Secara khusus, inklusifitas berfokus pada memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang latar belakang, keadaan, atau karakteristik mereka, memiliki kesempatan yang sama dan diakui dengan nilai yang setara. Bila dikaitkan dengan konsep pembangunan, Pembangunan yang inklusif adalah pembangunan yang melibatkan semua pihak dalam setiap prosesnya serta dapat dinikmati kemanfaatannya oleh semua kelompok masyarakat. Salah satu kelompok rentan yang kerap kali kurang diperhatikan dalam proses Pembangunan adalah kelompok disabilitas. Hal ini dikarenakan masih ada stigma dan stereotype yang negative terhadap mereka. Untuk itu pada tahun 2016, pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait penghormatan dan perlakuan layak terhadap kelompok disabilitas melalui Undang-Undang No.8 Tahun 2016.

Sejak lahirnya undang-undang ini, maka pelibatan kelompok disabilitas dalam segala sendi kehidupan bangsa dan negara harus dioptimalkan. Salah satu cara untuk mengoptimalkan pelibatan kelompok disabilitas dalam Pembangunan adalah melalui program Desa Inklusif atau Desa Ramah Disabilitas. Desa yang dibangun dengan pelibatan atau partisipasi semua masyarakat desa, dengan tujuan untuk mengafirmasi kelompok yang marginal, minoritas, miskin, dan rentan merupakan ciri khas desa yang inklusif. Di antara kelompok afirmasi tersebut, terdapat juga kelompok yang menyandang lebih dari satu status, di antaranya disabilitas/ difabel, transgender, perempuan yang menjadi kepala keluarga, dan kelompok minoritas (baik minoritas dalam hal agama maupun etnis). Satu dari banyaknya kabupaten yang ada di Jawa Barat dengan jumlah desa inklusif yang sedikit dibanding kabupaten lainnya adalah Kabupaten Purwakarta. Itupun, pencanangan beberapa desa sebagai desa inklusi karena program dari Kemendes untuk mendukung pencapaian SDG's Desa. Oleh karena itu, pada pengabdian kali ini, kelompok tim PKM memilih untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Inklusif bagi seluruh

Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta dengan harapan dan target akan lahir kesadaran untuk membuat Pembangunan desa yang inklusif, walaupun tanpa embel-embel desa inklusif.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diketahui bahwa perspektif inklusif masih belum mewarnai, bahkan dikenal di kalangan Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk mendorong terintegrasinya prinsip inklusifitas dalam perencanaan Pembangunan di desa.

Program ini akan membantu Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk mendorong para birokrat, terutama birokrat desa (Kepala Desa) agar aktif mengintegrasikan prinsip inklusifitas dalam perencanaan Pembangunan di desa. Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah para Kepala Desa di seluruh Kabupaten Purwakarta.

## METODE

Kegiatan ini akan diawali dengan persiapan yang berupa pencarian data sebagai bahan justifikasi lokus pengabdian masyarakat yang ditunjuk oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kampus Politeknik STIA LAN Jakarta, lalu setelah proposal tersusun maka Tim akan melakukan koordinasi dengan objek pengabdian. Tahapan kegiatan seperti tampak pada Tabel 1.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Waktu \ Aktivitas	II Juni	III Juni	IV Juni	I Juli	II Juli	III Juli
Penyusunan Proposal						
Revisi Proposal						
Koordinasi dengan Obyek						
Penyiapan Materi						
Penyiapan Undangan						
Pelaksanaan Pelatihan						
Penyusunan Laporan						
Pengumpulan Laporan						

Sumber: Tim Penulis (2023)

Koordinasi ini diperlukan untuk mengetahui kondisi real sehingga akan mudah dipetakan kebutuhan yang akan menjadi materi utama pada pelatihan nantinya. Pada masa koordinasi ini juga akan dilakukan identifikasi untuk mengumpulkan pihak-pihak yang akan menjadi peserta pelatihan. Selanjutnya Tim akan mempersiapkan materi pelatihan beserta instrumen pengukuran keberhasilan pelatihan (kuesioner pre dan post test). Tim juga akan direncanakan akan menyusun instrumen monitoring dan evaluasi implementasi materi pelatihan pada bussines process yang akan dilakukan.

Program pengabdian masyarakat ini akan berbentuk pelatihan bagi para birokrat desa (Kepala Desa). Materi pelatihan yakni tentang bagaimana strategi untuk mengintegrasikan prinsip inklusifitas dalam perencanaan pembangunan di desa

Tabel 1 berikut menunjukkan jadwal pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat yang dimulai sejak penyusunan proposal rencana kegiatan hingga pengumpulan laporan kegiatan. Jadwal pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini terlaksana selama 5 minggu di mulai sejak minggu kedua Juni 2023 hingga minggu ketiga Juli 2023.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan kepada perwakilan kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Pemilihan kepala desa berdasarkan perwakilan cluster desa sebelah utara, barat, timur, selatan, serta desa di sekitar pusat pemerintahan. Selain itu, dengan mempertimbangkan masukan dari Bagian Rehabilitasi dan Pemberdayaan Dinas Sosial Kabupaten Purwakarta serta perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).

Kegiatan pelatihan ini dilakukan melalui beberapa tahapan seperti, 1) Persiapan kegiatan, yang meliputi melakukan komunikasi awal dengan pihak terkait, identifikasi awal permasalahan, dan kebutuhan di Kabupaten Purwakarta dengan bagian Rehdya Dinas Sosial Kabupaten Purwakarta sebagai unit terkait, menyampaikan permohonan izin yang dilakukan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta, serta persiapan teknis pelaksanaan berupa menyiapkan alat survey pre-test dan post-test, jadwal dan tempat pelaksanaan, serta tim yang akan mengorganisir kegiatan.

Tahapan selanjutnya adalah kegiatan pelatihan dilaksanakan selama 4 hari, meliputi: 1) Hari pertama diawali dengan sesi koordinasi antara Tim Politeknik STIA LAN Jakarta dengan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka terkait dengan integrasi prinsip-prinsip inklusifitas dalam perencanaan pembangunan, sehingga Tim Politeknik STIA LAN Jakarta dapat menyesuaikan materi dan bahan yang akan disajikan; 2) Pada hari kedua, tim PKM melanjutkan dengan kegiatan pelatihan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah, Kabupaten Purwakarta. Pada pelatihan ini, tim PKM menyampaikan materi tentang konsep dasar Pembangunan inklusif sebagai pengantar. Lalu diteruskan dengan materi analisa program pembangunan yang telah dilaksanakan, apakah telah berperspektif inklusif atau belum dengan mengundang narasumber dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia. Peserta pada pelatihan ini adalah para Kepala Desa. Materi konsep dasar perencanaan Pembangunan yang inklusif merupakan materi yang baru untuk mereka sehingga para peserta tampak antusias dalam mengikuti kegiatan; 3) Pada hari ketiga, tim PKM melakukan audiensi dengan para pengurus APDESI untuk sekaligus melakukan penyamaan perspsi tentang perencanaan pembangunan inklusif di desa. Hal ini penting mengingat APDESI merupakan organisasi wadah para kepala desa untuk berkoordinasi dan bertukar pikiran terkait permasalahan dan program pembangunan

di desa mereka; serta 4) Pelatihan di hari keempat dilakukan di kantor Desa Dangdeur sebagai satu desa percontohan penerapan perencanaan Pembangunan inklusif. Bimtek di Desa Dangdeur dilaksanakan dengan melibatkan semua perangkat desa, kader dan perwakilan Masyarakat. Kegiatan pelatihan pada hari terakhir ini berisi penyampaian dasar-dasar konsep perencanaan Pembangunan inklusif serta strategi untuk mengintegrasikan prinsip inklusi dalam Pembangunan. Materi ini disampaikan oleh Tim Pengabdian Masyarakat dari Politeknik STIA LAN Jakarta dalam bentuk a) Survey pre-test dilakukan sebelum pelatihan untuk mengetahui pemahaman awal dari peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, b) Survey post-test yang dilakukan setelah pelatihan untuk mengetahui efektivitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, c) Rangkaian kegiatan PKM diakhiri dengan Focus Discussion Group (FGD) antara Tim PKM Politeknik STIA LAN Jakarta dengan teman-teman di Dinas Sosial Kabupaten Purwakarta guna melakukan evaluasi terhadap kegiatan pelatihan yang diadakan selama 4 hari sebelumnya serta Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai bekal bagi kegiatan selanjutnya, serta d) Penutupan kegiatan ini dilakukan oleh Ketua Tim PKM Politeknik STIA LAN Jakarta dengan menyampaikan harapan agar kegiatan pelatihan ini bermanfaat secara praktis bagi pemerintah daerah dalam mendorong para birokrat agar aktif memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam program pembangunan.

Tahapan terakhir berupa penutupan dan pelaporan kegiatan Pengabdian masyarakat, meliputi a) Olah data survey pre-test dan post-test dan mengidentifikasi efektivitas pelatihan yang dilakukan, serta b) Membuat laporan kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan pelatihan ini dilakukan kepada para kepala desa, aparat desa, kader serta perwakilan masyarakat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan lokus dan peserta yang berbeda selama 4 hari kegiatan.

Beberapa output yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini antara lain, 1) Peserta merasakan manfaat dari kegiatan ini karena topik yang diberikan sangat relevan dengan kondisi saat ini dimana banyak indikator kesuksesan pemerintah daerah yang mengkomodir implementasi nilai-nilai inklusif; 2) Peserta pelatihan terdorong untuk menginisiasi kegiatan MUSPANDI (Musrenbang Perempuan, Anak dan Disabilitas) di tingkat Desa dan Kabupaten setelah menyaksikan beberapa kisah sukses keberhasilan pembangunan; 3) Peserta pelatihan menjadi paham dengan konsep perencanaan pembangunan inklusif serta bagaimana implementasinya dalam program-program pembangunan; 4) Peserta pelatihan menyadari urgensi untuk melibatkan semua kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan outcome dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah laporan kegiatan yang nantinya dapat dikembangkan menjadi publikasi ilmiah agar manfaatnya semakin luas tidak

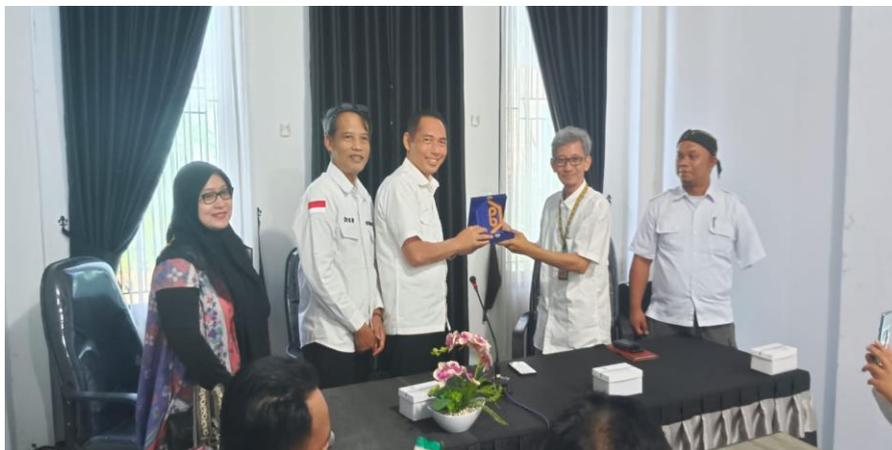
hanya kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta tetapi juga masyarakat umum lainnya.

Kegiatan pelatihan perencanaan Pembangunan inklusif dilaksanakan di 3 lokus yang berbeda, yakni Kantor Dinas Sosial, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah serta Kantor Desa Dangdeur. Sebelum pelatihan dilakukan, para peserta mengisi daftar hadir terlebih dahulu sebelum masuk ruangan. Kemudian kegiatan dibuka oleh Ketua Tim PKM Politeknik STIA LAN Jakarta dan dilanjut dengan survey pre-test. Secara bergantian para narasumber menyampaikan materi yang sudah disiapkan dilanjutkan dengan dikusi.



Gambar 1. Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Sosial menerima tim Pengabdian Masyarakat dari Politeknik STIA LAN Jakarta

Sumber: Dokumentasi Tim Penulis (2023)



Gambar 2. Pembukaan Bimtek bersama dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, APDESI Kabupaten Purwakarta, dan Kepala Desa

Sumber: Dokumentasi Tim Penulis (2023)

Secara umum kegiatan bimtek ini berjalan dengan baik dan lancar, namun demikian terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh tim pengabdian kepada masyarakat, antara lain: 1) Penentuan lokasi PKM yang bukan oleh Tim PKM menjadikan tim harus mencari justifikasi atas masalah yang ada; serta 2) Kurangnya fleksibilitas anggaran menyebabkan Tim tidak dapat secara optimal melakukan pendampingan perencanaan Pembangunan secara inklusif.



Gambar 3. Kegiatan pelaksanaan Bimtek  
Sumber: Dokumentasi Tim Penulis (2023)

## **Pembahasan**

Konsep eksklusi/ inklusi sosial telah dibahas secara luas di kalangan kebijakan sejak diperkenalkan oleh Lenoir di Perancis pada tahun 1974. Uni Eropa kemudian mengadopsinya pada tahun 1980-an, menggantikan konsep kemiskinan dalam diskusi kebijakan sosial. Menurut Bank Dunia, eksklusi sosial adalah sebuah proses yang ditandai dengan menurunnya solidaritas dan kurangnya kohesi atau integrasi sosial di dalam masyarakat. Pada tingkat individu, hal ini mengacu pada ketidakmampuan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan membangun hubungan sosial yang bermakna. Gagasan tentang eksklusi dan inklusi sosial ini sekarang telah berkembang di luar Eropa ke negara-negara berkembang, mendefinisikan kembali gagasan pembangunan ekonomi dengan menekankan pendekatan sosial dan strategi pembangunan yang inklusif.

Pendekatan inklusif bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang menerima dan mengikutsertakan orang-orang dari berbagai latar belakang dengan berbagai perbedaan, seperti karakteristik, kemampuan, status sosial, etnis, dan budaya. Lingkungan yang inklusif ditandai dengan masyarakat yang terbuka, ramah, dan mengatasi hambatan, di mana setiap warga saling menghargai dan menerima perbedaan (Lenoir, 1974). Dalam lingkungan ini, semua individu dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menggunakan hak dan memenuhi kewajibannya (Lenoir, 1974). Konsep pembangunan sosial mencakup berbagai tujuan, termasuk menyediakan pendidikan yang lebih baik, akses ke layanan kesehatan, meningkatkan kondisi kehidupan, mengurangi kemiskinan, memastikan kesetaraan kesempatan, mempromosikan kebebasan individu, dan mendorong kehidupan budaya yang dinamis.



Gambar 4. Sesi tanya jawab  
Sumber: Dokumentasi Tim Penulis (2023)

Konsep pembangunan sosial melihat banyak hal yang harus diperjuangkan, antara lain akses terhadap pendidikan yang lebih baik, akses terhadap kesehatan dan peningkatan standar gizi, pengentasan kemiskinan, perbaikan kondisi lingkungan, akses terhadap kesempatan yang sama, kebebasan individu yang setara, dan kehidupan budaya yang segar. Pendekatan pembangunan yang lebih berwawasan ekonomi telah dikritik oleh para ilmuwan sosial dan sosiolog untuk mendorong badan dunia UNESCO untuk ikut serta memperbarui pendekatan pembangunan yang digunakan di semua negara, termasuk negara berkembang dengan menerapkan prinsip inklusi dalam pembangunan.

Pendekatan pembangunan yang inklusif sangat penting untuk memastikan partisipasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan mendorong inklusi sosial. Di

Indonesia, model pembangunan saat ini sebagian besar difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, yang dapat menyebabkan eksklusi sosial (Wirutomo, 2013). Pengucilan ini dapat mengakibatkan terbentuknya sikap, kepercayaan, dan budaya yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Pengucilan sosial dapat terjadi dalam dua bentuk: obyektif dan subyektif. Pengucilan obyektif terjadi ketika individu atau kelompok secara sengaja tidak diberikan hak-hak yang seharusnya, mulai dari yang kompleks hingga yang sederhana. Sebaliknya, eksklusi subjektif muncul ketika kebijakan tidak diimplementasikan atau diatur dengan baik. Konsekuensi dari pengucilan subyektif sangat merusak ketika melibatkan segregasi kelompok mayoritas, terutama dalam kasus-kasus di mana konflik agama atau etnis menonjol. Untuk mencegah eksklusi sosial, pendekatan pembangunan yang lebih komprehensif dan inklusif diperlukan untuk memastikan partisipasi yang setara bagi semua individu dan masyarakat dalam membentuk kota mereka (Warsilah, 2015).

Pierson (2009) berpendapat bahwa pengucilan sosial didorong oleh lima faktor utama: kemiskinan, upah atau pendapatan yang rendah, terbatasnya kesempatan kerja, lemahnya sistem dukungan sosial, pengaruh lingkungan, dan kurangnya akses terhadap layanan publik. Lenoir (1974) lebih lanjut mengidentifikasi sepuluh kategori individu yang mungkin mengalami pengucilan sosial, termasuk penyandang disabilitas fisik dan mental, orang yang putus asa, orang tua lanjut usia, korban kekerasan, penyalahguna narkoba, korban kenakalan remaja, orang yang terisolasi secara sosial, orang tua tunggal, kelompok yang termarginalkan, dan mereka yang menyandang cacat sosial. Untuk memerangi pengucilan sosial di antara penduduk kota, para pemimpin kota harus menggunakan pendekatan pembangunan inklusif yang melampaui bidang ekonomi. Pendekatan ini harus memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses terhadap manfaat pembangunan, termasuk infrastruktur dan layanan dasar.

Menurut Wirutomo (2013), pembangunan inklusif diusulkan sebagai model pembangunan sosial terbaru. Model ini menekankan perlunya pendekatan holistik dalam pembangunan, bukan hanya berfokus pada aspek sektoral dan ekonomi. Meskipun anggaran sektoral masih menjadi bagian penting dari mekanisme pembangunan, konsep pembangunan harus berpusat pada manusia sebagai subjek pembangunan. Hal ini melibatkan pemeriksaan interaksi dan keterkaitan di dalam masyarakat. Dengan berfokus pada pembangunan interaksi dan interelasi sosial, pembangunan sosial dapat berkontribusi pada terciptanya kehidupan sosial dan budaya yang berorientasi pada kualitas sosial budaya. Secara teoritis, model pembangunan sosial seperti ini berpotensi menciptakan masyarakat yang inklusif.

Pembangunan inklusif bertujuan untuk membangun kualitas hidup sosial budaya, dan menggunakan komponen sosial untuk menganalisis kualitas kehidupan sosial dan budaya termasuk struktur sosial, budaya, dan proses sosial. Sejak awal tahun 80-an, para sosiolog khususnya di benua Eropa mulai mengkritik model pembangunan ekonomi dan menawarkan pendekatan sosial yang lebih mampu menggambarkan permasalahan sosial yang ada, yaitu dengan menggunakan pendekatan modal sosial dan eksklusi sosial. Seperti halnya relasi sosial (hubungan antar manusia) pada umumnya, modal sosial juga hampir selalu terlibat.

Bank Dunia menekankan pentingnya modal sosial dalam proses pembangunan dalam laporan tahunannya, " *Entering the 21st Century*." Konsep modal sosial yang

dikembangkan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa modal sosial ada di semua aspek masyarakat, termasuk hubungan ekonomi, sosial, dan politik, dan memiliki pengaruh terhadap fungsi pasar dan negara (World Bank, 1998, 2001). Laporan ini juga menyatakan bahwa hubungan yang stabil antara para pelaku dapat menghasilkan perilaku kolektif dan individu yang lebih efektif dan efisien. Lebih lanjut, laporan ini menekankan bahwa modal sosial dapat diperkuat dalam suatu masyarakat, namun membutuhkan dukungan sumber daya tertentu untuk melakukannya. Terakhir, laporan ini menyoroti perlunya anggota masyarakat untuk secara aktif mendukung terciptanya hubungan sosial dan kelembagaan yang baik. Secara keseluruhan, konsep modal sosial Bank Dunia menggarisbawahi pentingnya modal sosial dalam mendorong pembangunan dan menyerukan pengakuan dan dukungan terhadap modal sosial oleh masyarakat dan institusi.

Modal sosial, seperti yang didefinisikan oleh Bank Dunia, adalah kombinasi dari institusi, hubungan, sikap, dan nilai-nilai yang membentuk interaksi dalam masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial (World Bank, 1998). Modal sosial adalah perekat yang mengikat individu-individu menjadi satu. Agar dapat berfungsi secara optimal, modal sosial membutuhkan nilai-nilai yang dianut bersama, hubungan pribadi, kepercayaan, dan rasa tanggung jawab bersama. Kegiatan pembangunan akan lebih mudah dicapai dan biayanya lebih murah jika ada modal sosial yang kuat yang mendukungnya (Grootaert & Van Bastelaer, 2001; Narayan-Parker & Pritchett, 1997). Namun, modal sosial hanya akan bernilai jika dapat membantu individu dan kelompok untuk mengakses sumber daya keuangan, informasi, pekerjaan, dan aspek-aspek penting lainnya dalam kehidupan (Tonkiss, 2000).

Jaringan sosial dianggap sebagai bagian dari modal sosial, namun hal itu saja tidak cukup untuk pengembangan masyarakat yang komprehensif. Selain modal sosial, bentuk-bentuk modal lain seperti modal fisik dan finansial juga diperlukan untuk memberikan dampak yang signifikan. Putnam (1993) mendefinisikan modal sosial sebagai fitur-fitur organisasi sosial, seperti jaringan, norma, dan kepercayaan, yang meningkatkan potensi produktif masyarakat. Kepercayaan, jaringan, dan masyarakat sipil dipandang sebagai hasil dari modal sosial, dan mempelajari ketiganya dapat membantu memprediksi kekuatan dan perkembangan modal sosial dalam suatu masyarakat. Secara keseluruhan, modal sosial memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat, tetapi harus disertai dengan bentuk modal lain untuk mewujudkan potensi penuhnya.

Berdasarkan hasil survei *Pre* dan *Post Test* pelatihan yang diadakan dapat disajikan data sebagai berikut. Dari 16 peserta yang mengikuti pelatihan ini, 68.8% peserta belum pernah membaca Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas dan hanya 31.3% yang sudah membaca peraturan daerah tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel 2. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta pelatihan belum memiliki pemahaman akan adanya peraturan daerah yang menjadi *legal standing* penyelenggaraan perlindungan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Purwakarta.

Tabel 2. Pemahaman Perda Disabilitas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pernah	5	31.3	31.3	31.3
	Belum pernah	11	68.8	68.8	100.0
	Total	16	100.0	100.0	

Sumber: Tim Penulis (2023)

Survey ini kemudian mengidentifikasi pelibatan Perda yang ada dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta, di mana 60% peserta belum menggunakan Perda Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas tersebut dalam perumusan rencana pembangunan daerah, 20% sudah menggunakan sebagian kecil perda tersebut dalam perencanaan pembangunan daerah, serta 20% sudah menggunakan sebagian besar perda tersebut dalam perencanaan pembangunan di daerahnya sesuai tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Penggunaan Perda dlm perencanaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum Digunakan	3	18.8	60.0	60.0
	Sebagian Kecil	1	6.3	20.0	80.0
	Sebagian Besar	1	6.3	20.0	100.0
	Total	5	31.3	100.0	
Missing System		11	68.8		
Total		16	100.0		

Sumber: Tim Penulis (2023)

Dalam menyusun rencana pembangunan daerah, 66.7% peserta belum melibatkan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan sedangkan 33.3% peserta sudah melibatkan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan sebagaimana ditampilkan pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Pelibatan Penyandang Disabilitas dlm perencanaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sudah	5	31.3	33.3	33.3
	Belum	10	62.5	66.7	100.0
	Total	15	93.8	100.0	

Missing	System	1	6.3		
Total		16	100.0		

Sumber: Tim Penulis (2023)

Berdasarkan pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta, diperoleh data bahwa 60% penyandang disabilitas terlibat secara aktif dalam perencanaan pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, sedangkan 40% tidak aktif dan sedikit aktif terlibat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Hal ini ditunjukkan dari *survey* yang disajikan dalam tabel 5.

Tabel 5. Keaktifan penyandang disabilitas dalam keterlibatan perencanaan Pembangunan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak aktif/sedikit	2	12.5	40.0	40.0
	Aktif/banyak	3	18.8	60.0	100.0
	Total	5	31.3	100.0	
Missing	System	11	68.8		
Total		16	100.0		

Sumber: Tim Penulis (2023)

Selain terkait dengan perencanaan pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Purwakarta, tim Pengabdian kepada Masyarakat juga melakukan *survey* terkait pelaksanaan kegiatan ini. Berdasarkan *survey* yang dilakukan diperoleh data bahwa 93.8% kepala desa yang menjadi peserta menyatakan pelatihan perencanaan pembangunan inklusif bagi kepala desa di Kabupaten Purwakarta mudah dipahami dan sisanya 6.3% menyatakan sangat mudah untuk dipahami. Tabel 6 memberikan gambaran terkait dengan kemudahan pemahaman akan materi yang diberikan.

Tabel 6. Kemudahan Pemahaman Materi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Mudah	15	93.8	93.8	93.8
	Sangat Mudah	1	6.3	6.3	100.0
	Total	16	100.0	100.0	

Sumber: Tim Penulis (2023)

Tim Pengabdian kepada Masyarakat melanjutkan *survey* ini dengan menanyakan kemenarikan materi pelatihan. Diperoleh data bahwa 87.5% peserta pelatihan

perencanaan pembangunan inklusif bagi kepala desa di Kabupaten Purwakarta menyatakan bahwa materi yang disampaikan menarik dan 12.5% peserta menyatakan bahwa materi yang disampaikan sangat menarik. Tabel 7 memberikan gambaran lebih detail dari respon peserta pelatihan.

Tabel 7. Kemenarikan materi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Menarik	14	87.5	87.5	87.5
	Sangat Menarik	2	12.5	12.5	100.0
	Total	16	100.0	100.0	

Sumber: Tim Penulis (2023)

Kemudian tim juga menanyakan sejauh mana materi pelatihan yang diberikan penting bagi kepala desa dalam membuat rencana pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Purwakarta. 68.8% peserta menyatakan materi yang disampaikan penting bagi mereka untuk menyusun rencana pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Purwakarta dan 31.3% menyatakan materi yang disampaikan sangat penting bagi peserta. Tabel 8 menunjukkan sajian data tentang pentingnya materi pelatihan dalam Menyusun rencana pembangunan di daerah.

Tabel 8. Pentingnya materi pelatihan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Penting	11	68.8	68.8	68.8
	Sangat Penting	5	31.3	31.3	100.0
	Total	16	100.0	100.0	

Sumber: Tim Penulis (2023)

Jika dikaitkan antara kebermanfaatan materi dengan respon terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas, maka 75% peserta menyatakan bahwa materi yang didapatkan sudah bermanfaat dan 25% peserta menyatakan materi yang diperoleh sangat bermanfaat sebagaimana disajikan dalam tabel 9 berikut ini.

Tabel 9. Kebermanfaatan materi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bermanfaat	12	75.0	75.0	75.0
	Sangat Bermanfaat	4	25.0	25.0	100.0
	Total	16	100.0	100.0	

Sumber: Tim Penulis (2023)

Tim penulis kemudian mengidentifikasi akan keberlanjutan kegiatan ini di mana 50% peserta menyatakan perlunya pembekalan lebih lanjut berupa informasi teknis lebih lanjut dan 50% lainnya menyatakan perlunya pendampingan khusus bagaimana merespon Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang dalam merencanakan pembangunan yang sensitif/ responsif disabilitas. Tabel 10 menunjukkan sebaran data peserta yang memerlukan pendekatan dan pendampingan lebih lanjut.

Tabel 10. Kebutuhan info teknis lbh lanjut/ pendampingan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perlu pembekalan lebih lanjut	8	50.0	50.0	50.0
	Perlu penampungan	8	50.0	50.0	100.0
	Total	16	100.0	100.0	

Sumber: Tim Penulis (2023)

Dari *survey* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dilakukan kepada peserta, terdapat beberapa rekomendasi yang diajukan oleh tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat antara lain kegiatan lanjutan dapat dilakukan terkait sosialisasi dan pendampingan penyusunan panduan (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan *Standar Operating Procedure*) perencanaan pembangunan inklusif. Selain itu perlunya audiensi dan pendampingan lebih lanjut dalam penyusunan program kerja dan pembangunan yang inklusif di Kabupaten Purwakarta.

## SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan pelatihan perencanaan pembangunan inklusif bagi Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta dapat disimpulkan bahwa kegiatan sudah terlaksana dengan baik, di mana kegiatan yang sudah dilakukan ini mendapat respon yang sangat baik dari para kepala desa, Hasil *survey* pre-test dan post-test menunjukkan terdapat peningkatan pemahaman dan pengetahuan, evaluasi atas pelaksanaan kegiatan, saran dan masukan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu peserta juga mendapat pembelajaran yang dengan adanya forum diskusi berbentuk FGD dan mendapat gagasan dari narasumber yang dihadirkan.

Kelebihan dari kegiatan PKM ini antara lain mendapatkan respon yang positif dari peserta ditunjukkan dengan hasil survei di bagian pembahasan di mana terdapat

peningkatan pemahaman dan pengetahuan yang diukur dari hasil survei pre-test dan post-test para kepala desa terkait perencanaan pembangunan inklusif. Pembelajaran melalui diskusi dan narasumber berbentuk FGD juga efektif dilakukan didukung kehadiran narasumber ahli memberikan kesempatan bagi peserta untuk saling bertukar ide dan memperoleh gagasan baru. PKM ini juga memiliki kelebihan karena mendapat saran dan masukan yang penting dimana evaluasi dari peserta memberikan masukan yang berharga untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan di masa depan.

Meskipun terdapat beberapa kelebihan, namun kegiatan PKM ini masih memiliki keterbatasan yang memerlukan kegiatan lanjutan dimana masih ada kebutuhan akan solusi yang lebih konkret dan komprehensif bagi lokus kegiatan. Selain itu pemerintah Kabupaten dan desa masih memerlukan strategi keberlanjutan adaptasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas agar manfaat kegiatan ini semakin baik. Pelibatan masyarakat penyandang disabilitas juga perlu dipertimbangkan dalam perumusan rencana pembangunan daerah Purwakarta agar manfaat kegiatan lebih adaptif dengan kebutuhan mereka.

Tim penulis memberikan saran yang dapat dilakukan bagi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dimana kegiatan sejenis perlu dilakukan secara berkala, termasuk juga melakukan kegiatan lanjutan agar dapat diberikan solusi yang konkret dan komprehensif bagi lokus kegiatan khususnya dalam hal pemahaman dan adaptasi Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas serta pelibatan penyandang disabilitas dalam perumusan rencana pembangunan daerah Purwakarta sehingga manfaat yang dirasakan lebih adaptif dengan masyarakat yang menyandang disabilitas. Selain itu pemerintah desa dapat meningkatkan pelibatan penyandang disabilitas dalam perumusan rencana pembangunan daerah Purwakarta dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dampak jangka panjang dari kegiatan pengabdian masyarakat.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim PKM mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didanai dari Politeknik STIA LAN Jakarta. Tim PKM juga berterima kasih kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Purwakarta, serta Perangkat Desa Dangdeur Kabupaten Purwakarta yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Grootaert, C., & Van Bastelaer, T. (2001). *Understanding and measuring social capital: A synthesis of findings and recommendations from the social capital initiative* (Vol. 24). World Bank, Social Development Family, Environmentally and Socially ....
- Lenoir, R. (1974). 1989. *Les Exclus: Un Francais Sur Dix*. Paris: Editions Du Seuil.
- Narayan-Parker, D., & Pritchett, L. (1997). *Cents and sociability: Household income and social capital in rural Tanzania* (Vol. 1796). World Bank Publications.
- Pierson, J. H. (2009). *Tackling social exclusion: Promoting social justice in social work*. Routledge.
- Putnam, R. (1993). The prosperous community: Social capital and public life. *The American*, 4.
- Tonkiss, F. (2000). Trust, social capital and economy. In *Trust and civil society* (pp. 72–89). Springer.
- Warsilah, H. (2015). Pembangunan inklusif sebagai upaya mereduksi eksklusi sosial perkotaan: Kasus kelompok marjinal di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 17(2).
- Wirutomo, P. (2013). Mencari Makna Pembangunan Sosial: Studi Kasus Sektor Informal di Kota Solo. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 18(1).
- World Bank. (1998). *World Development Report 1998/1999: Knowledge for Development*. Oxford University Press. <http://hdl.handle.net/10986/5981>
- World Bank. (2001). *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*. [World Development Report]. Oxford University. <http://hdl.handle.net/10986/11856>